

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari—kurang lebih 17,000 kepulauan, 400 etnis, 250 dialek yang berbeda. Keanekaragaman dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan keanekaragaman terletak jika dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan kreativitas dan interaksi yang saling melengkapi. Sedangkan kerugian dari keanekaragaman adalah menurunnya kohesi dan kepaduan sosial, yang disebabkan oleh konflik kepentingan berbagai elemen pendukungnya.

Masyarakat dengan komposisi tersebut menurut Furnivall (1967) disebut sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) yaitu masyarakat yang mempunyai karakteristik yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tata sosial (*social orders*) yang hidup saling berdampingan, tetapi tidak melebur ke dalam suatu satuan sosial yang berada dalam suatu unit politik tertentu. Lebih lanjut menurutnya, ciri lain dari masyarakat majemuk apabila dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang lebih homogen adalah tidak adanya kehendak sosial bersama.¹

Salah satu elemen penting pembentuk kemajemukan masyarakat Indonesia adalah etnis dan agama.² Kelompok etnis dan agama keduanya sama-sama menjadi identitas individu yang diturunkan dari kelompoknya, dapat menumbuhkan kecenderungan pada kelompok sendiri, menganggap kelompoknya yang terbaik dan kelompok luar buruk. Namun, agama berbeda dengan kelompok etnis, agama bagi penganutnya mampu memberikan jawaban *ultima* atas makna dan tujuan kehidupan, serta mampu memberikan justifikasi dan legitimasi 'suci' terhadap tindakan individu dan kelompok. Lebih dari itu,

¹ Robert Hefner, *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), 6

² Etnis menurut Weber merupakan "suatu penggolongan dasar dari suatu keanggotaan sosial yang anggotanya mempunyai *pemahaman subjektif* terhadap kesamaan asal, budaya, atau dapat dikarenakan kesamaan pengalaman kolonialisasi dan migrasi. Kelompok etnis berbeda dengan *kinship* (kesukuan) yang didasarkan pada warisan biologis." Max Weber, *Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology*, vol. 1, (Berkeley: University of California Press, 1978), 385

'agama' menjadi kategori terpenting 'identitas' masyarakat Indonesia jauh melampaui kategori lainnya seperti; kebangsaan, jenis pekerjaan, latar belakang etnis, status sosial, dan berbagai kategori lainnya.³ Kekerasan sosial apabila melibatkan sentimen keagamaan dan etnis akan menelan korban yang jauh lebih banyak dari jenis kekerasan lainnya.⁴

Masalah-masalah yang bersumber pada perbedaan agama di Indonesia, sesungguhnya telah lama diakui pemerintah. Di masa lalu, masalah tersebut dipendam dengan alasan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Pemerintah seakan menerapkan standar ganda dalam kebijakan keagamaan. Di satu sisi membebaskan warganya dalam menganut dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, namun di sisi lain, mengharuskan warganya mencantumkan identitas keagamaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP); Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghucu.

Dalam mengatur hubungan antarumat beragama, pemerintah mendirikan Wadah Musyawarah, yaitu merupakan forum komunikasi antarumat beragama, khususnya tokoh-tokoh agama. Forum tersebut bertujuan agar tokoh-tokoh agama dapat memusyawarahkan persoalan-persoalan keagamaan, serta dapat memberikan tauladan dan menumbuhkan sikap saling menghormati perasaan satu sama lainnya.⁵ Salah satu Wadah Musyawarah di Jakarta, adalah Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini didirikan oleh majelis-majelis agama, pemuka Agama/Kyai/Ulama/Cendekiawan.⁶

³ Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, "Islam dan Kebangsaan; temuan survey Nasional 2007"

⁴ Pola-pola konflik di Indonesia antara tahun 1990-2003, yaitu: Etnis-komunal (antaretnis, antaragama, dan antarsekte di dalam satu agama); Separatis (seperti di Aceh dan Papua); Negara-masyarakat (serangan aparat terhadap warga dan sebaliknya); Ekonomi (seperti sengketa lahan, konflik industri, konflik sumberdaya alam); Lain-lain (perkelahian antardesa, antarkelompok, santet, dan lain-lain). Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, dan Zulfan Tadjoeddin, "*Patterns of Collective Violence in Indonesia 1990-2003*" (Jakarta: UNSFIR, 2004)

⁵ Ali Munhanif, "Prof.Dr.A.Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta INIS-PPIM-Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1998), 305

⁶ Profile FKKUB Provinsi DKI Jakarta

Pendirian FKKUB diharapkan mampu menjadi salah satu pranata sosial yang bersifat integratif. Menurut Bath (1976) untuk menciptakan integrasi dipersyaratkan tersedianya sejumlah pranata yang mengikat semua anggota kelompok sosial, etnis atau agama, sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi dirinya pada suatu ciri yang dimiliki oleh warga kelompok sosial yang lain.⁷

B. Ruang Lingkup Permasalahan

Hubungan antarumat beragama di Indonesia selalu menunjukkan hubungan yang dinamis. Kadang hubungan tersebut berbentuk kerjasama dan tidak jarang pula berbentuk konflik. Pada masa kolonial, ketegangan hubungan umat Islam dan umat Kristen dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan Belanda, baik bantuan politik maupun finansial. Sementara pada masa Orde lama ketegangan mencuat saat pembahasan UUD 1945 khususnya mengenai 'piagam Jakarta' yang dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam. Pada masa Orde Baru, pemerintah memperkenalkan dialog antarumat beragama, tercatat antara tahun 1972-1977 telah diselenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota di Indonesia.⁸

Pada dekade tahun 1980-an dialog antarumat telah banyak dilakukan, baik oleh para tokoh agama, intelektual muda maupun pemerintah sendiri. Beberapa diantaranya mengambil model dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darmadan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI). Ada juga dialog teologi (*theological dialogue*). Dialog untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. seperti Interfidei, Paramadina, MADIA, dan lain-lain. Serta dialog kehidupan (*dialogue of live*), dialog seperti ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian "hal-hal praktis dan aktual" yang biasanya diselenggarakan kelompok-kelompok kajian dan LSM atau NGO.

⁷ Fredik Bart, *Kelompok Etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI Press, 1988), 20

⁸ Jurnal *Ulumul Qur'an*, IV (1993), 4

Namun, sampai sekarang konflik bernuasa agama masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan sosial seperti yang pernah terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, Ketapang, Kupang, Ambon, Poso, Maluku dan di beberapa tempat lainnya, menjadi indikator penguatan basis etnik dan agama yang berada di tingkat lokal yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, gereja dan berbagai sarana umum lainnya. Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara idealitas agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Salah satu pranata agama yang selama ini diandalkan dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama dan menyalurkan program pemerintah adalah tokoh-tokoh agama. Kemampuan tokoh-tokoh agama terletak pada kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, mereka mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Dalam usaha mencapai tujuannya, FKKUB menekankan pendekatan dialog yaitu pertemuan hati dan pikiran antara berbagai macam penganut agama, yang merupakan jalan bersama menuju kebenaran dan kerjasama untuk kepentingan bersama, dalam semangat kejujuran dan tanpa maksud yang tersembunyi. Lebih dari itu, bagi FKKUB dialog antarumat beragama merupakan segala usaha dalam rangka membangun masyarakat yang bermoral, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi keadilan, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan penyebaran gagasan multikultural.⁹

Tantangan FKKUB dalam membangun dialog antarumat beragama berhadapan dengan kompleksitas persoalan masyarakat Jakarta akibat konsentrasi demikian banyak latar belakang etnis dan kebudayaannya. Disinilah letak relevansi penelitian peran Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) dalam membangun dialog antarumat beragama di Jakarta.

⁹ Profil FKKUB Provinsi DKI Jakarta

C. Pertanyaan Penelitian

1. Sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia seringkali diwarnai konflik. Bagaimana peran Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) dalam membangun dialog antarumat beragama?
2. Apa strategi Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) yang memberikan sumbangan pada dialog antarumat beragama di Jakarta?
3. Apa program Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) yang memberikan sumbangan pada dialog antarumat beragama di Jakarta?
4. Apa bentuk dukungan yang diterima Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) dalam membangun dialog antarumat beragama di Jakarta baik dari masyarakat maupun pemerintah?
5. Bagaimana pengaruh eksternal dan internal yang mempengaruhi aktivitas peran FKKUB dalam membangun dialog antar umat beragama di Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran deskriptif-analitis tentang peran Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) dalam membangun dialog antarumat beragama di Jakarta. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis sejarah hubungan antarumat beragama, kasus-kasus konflik antarumat beragama serta pengaruh eksternal dan internal yang mempengaruhi peran FKKUB dalam menyikapi kondisi sosial-keagamaan masyarakat Jakarta. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran FKKUB dalam dialog antarumat beragama di Jakarta.

E. Signifikansi Penelitian

Hubungan antarumat beragama yang kelihatannya harmonis di permukaan, sebenarnya menyimpan bahaya yang dapat menyebabkan konflik bahkan kekerasan, berbagai macam isu seperti penggunaan bangunan untuk tempat ibadah, isu bom dan kebijakan yang diskriminatif tentang agama yang beredar di tengah-tengah masyarakat dapat mengganggu hubungan antarumat beragama di Jakarta.

Di tengah maraknya berbagai kekerasan sosial bernuansa agama di beberapa daerah di Indonesia seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Ketapang, Kupang, Ambon, Poso, Maluku dan di beberapa daerah lainnya yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja, komunitas keagamaan di Jakarta tidak terpancing untuk melakukan hal yang sama. Keberhasilan tersebut salah satunya berkat adanya komunikasi dan kerjasama yang intensif antar tokoh-tokoh agama yang salah satunya tergabung dalam FKKUB Provinsi DKI Jakarta

1. Secara Teoritis

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan kerangka teori dan kerangka aksi gerakan sosial keagamaan dalam mendesiminasikan gagasan kerjasama antarumat beragama dengan model Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Jakarta.

2. Signifikansi Kebijakan

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada organisasi-organisasi sosial keagamaan khususnya FKKUB, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta umumnya untuk bersama-sama memberikan kontribusi pada kerukunan antarumat beragama.

F. Tinjauan Pustaka

1. Review studi terdahulu

Kajian tentang hubungan antarumat beragama telah banyak dilakukan, beberapa karya hasil penelitian yang dianggap relevan untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Karya (Alm) Soeminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het kantoor voor Inlandshe zaken* (Jakarta: LP3ES, 1985). Dalam penelitian ini Soeminto menggambarkan pergulatan antara pemerintah Hindia-Belanda dengan penduduk pribumi, yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Hindia-Belanda dengan segala daya upaya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya,

sedangkan pribumi berusaha melepaskan diri dari cengkraman Belanda. Salah satu upaya dalam dalam melanggengkan kekuasaannya adalah memahami penduduk pribumi. Dengan tujuan tersebut Belandan mendirikan 'Kantor Urusan Pribumi.'

Agama menjadi permasalahan penting dalam memahami penduduk pribumi. Sikap pemerintah Belanda pada awalnya bersifat 'neutral agama' yang tercermin dalam undang-undang diantara isinya 'tidak boleh mencampuri masalah agama.' Dalam perjalanan waktu, sikap tersebut berubah menjadi deskriminasi terhadap pribumi khususnya terhadap Islam. Sikap Belanda 'dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan berlebihan'. Di satu pihak Belanda khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan 'kristenisasi' akan banyak membantu berbagai macam persoalan.

Lembaga ini, bukan hanya mengatur masalah politik Islam, tapi ada yang nilainya sebagai 'inti administrasi' pemerintah. Melalui lembaga ini, penelitian aneka bahasa, adat istiadat, antropologi, kecenderungan agama, politik dan kebudayaan penduduk pribumi dan Arab dilakukan.

Lembaga ini juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada Gubernur Jenderal dalam kasus pengangkatan Bupati baru; berwenang mengontrol pemakaian gelar atau memberikan pertimbangan gelar para penduduk, baik gelar resmi ataupun pribadi; meneliti berbagai posisi seperti penghulu kepala, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, organisasi pribumi, peraturan haji; menganalisa aneka berita dalam surat kabar dan publikasi; serta melakukan berbagaimacam penelitian aneka bahasa, adat istiadat, antropologi, kecenderungan agama, politik dan kebudayaan penduduk pribumi dan Arab di Nusantara.

2. Penelitian Bouta, O-relana, dan Abu-Neimer (2005) tentang *Faith Based Peace Building: Mapping and Analysis of Christian, Muslim and Multi-Faith Actors*. Studi ini memfokuskan pada peran organisasi sosial keagamaan dalam memberikan sumbangan pada

pembangunan perdamaian, khususnya dalam tradisi Islam dan Kristen. Sebanyak 14 organisasi Islam dan 13 organisasi Kristen diteliti dengan mempelajari bagaimana misi, strategi dan pola gerakan dalam membangun perdamaian. Beberapa hasil temuan menariknya adalah; *Pertama*, bahwa organisasi sosial keagamaan yang berbasiskan Islam sebagai spirit bagi gerakannya lebih sulit diidentifikasi, di mana kebanyakan organisasi ini digerakkan oleh individu-individu seperti imam dan *syeh* berdasarkan pada kapasitas kemampuan mereka; *Kedua*, banyak lembaga-lembaga sosial keagamaan telah memberikan pembangunan perdamaian bukan hanya soal agama, namun mereka juga memberikan kontribusi penyebaran gagasan ide-ide seperti Demokrasi, HAM, Kemiskinan dan *Good Government*; *Ketiga*, organisasi-organisasi sosial, baik itu yang 'moderat' dan 'konservatif' keduanya dapat memerankan pembangunan perdamaian.

3. Penelitian Qowa'id (2000) tentang "Dialog antarumat Beragama di Kalimantan Selatan". Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan dari pelaksanaan kegiatan program dialog. Penelitian ini menyimpulkan, secara umum kegiatan dialog berjalan dengan baik, walaupun dijumpai beberapa kelemahan atau kekurangan di pelbagai tahapan dan aspek. Diantara kelemahannya adalah, masalah persiapan pelaksanaan dialog oleh panitia yang masih kurang, kurangnya wawasan nara sumber mengenai agama lain, minimnya waktu penyelenggaraan, kurangnya fasilitas, kegiatan dan metode yang kurang variatif, termasuk kurangnya materi buku dan referensi yang aktual. Secara umum, keberhasilan dialog ini antara lain: mereka bisa saling mengenal, lebih mengetahui berbagai problem yang dihadapi, bersedia saling mendengarkan dan saling introspeksi, tenggang rasa dan seterusnya.

2. Dialog antar Umat Beragama

Dialog dapat diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, dialog merupakan pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling

memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya. Dialog merupakan komunikasi antar individu, yang bertujuan bukan untuk merubah dan mempengaruhi namun untuk saling memahami.¹⁰

Sedangkan agama merupakan respon manusia terhadap realitas yang dianggap sebagai 'yang suci', serta pemahaman, penyingkapan dan perayaan terhadap 'yang suci' merupakan hal penting dalam memahami eksistensi manusia.¹¹ Menurut Otto (1917) 'yang suci' atau numinous merupakan sesuatu di luar konsepsi rasional dan etika manusia. 'Yang suci' (*the holy*) merupakan inti terdalam dan riel dari semua agama. Selain itu 'yang suci' mengandung getaran dan pesona (*mysterium tremendum et fascinocum*).¹² Durkheim mendefinisikan agama dengan : "merupakan suatu kesatuan sistem kepercayaan dan praktek yang menghubungkan manusia dengan realitas 'yang suci'...kepercayaan dan praktek tersebut mampu menyatukan manusia dalam suatu moral komunitas tertentu."¹³ Sedangkan menurut Appleby, agama merupakan institusi historis yang memiliki sistem kepercayaan (*creed*), sistem peribadatan (*cult*), norma-norma, aturan, anjuran-anjuran moral (*code*) tentang perilaku kehidupan yang harus dijalankan oleh pemeluknya.¹⁴ Dalam hal ini, agama menyediakan suatu cakrawala tentang dunia di luar manusia dan sarana ritual yang memungkinkan manusia berhubungan dengan realitas yang di luar jangkauannya tersebut, dianggap mampu memberikan jaminan keselamatan bagi manusia dan mempertahankan moralnya. Sarana ritual merupakan elemen kategoris, yang dengannya 'agama' dapat difahami dan mengubungkan agama dengan realitas kemanusiaan.

Setiap agama atau kepercayaan mempunyai elemen kategoris tertentu yang diajarkan oleh pendiri agama tersebut. Para pendiri agama menurut Weber merupakan tokoh kharismatik, yaitu:

"Suatu kualitas tertentu dalam kepribadian seseorang dengan mana dia dibedakan dengan dari orang biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang

¹⁰ D. Hendropuspito, O.C, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kanisius, 1983), 172

¹¹ R. Scott *Religion, Violence and Reconciliation* (England: Rowman&Littlefield, 2000), 8

¹² Otto, Rudolf, *The Idea of the Holy: an Inquiry into the non-rational Factor in the idea of the divine and its relation to the rational*, (Harmondsworth: Penguin Book, 1917), 6

¹³ Emile Durkheim, *the Elementary Forms of the Religious Life* (New York: The Free Press, 1965), 62

¹⁴ Appleby, *The Ambivalence of The Sacred*...9

memperoleh anugerah kekuasaan adikodrati, adimanusiawi, atau setidaknya tidaknya kekuatan atau kualitas yang sangat luar biasa. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai berasal dari kayangan atau sebagai teladan dan atas dasar itu individu tersebut diperlakukan sebagai seorang pemimpin.”¹⁵

ajaran tokoh kharismatik tersebut kemudian terlembaga dalam suatu agama dan kepercayaan tertentu.

Setiap kelompok keagamaan memiliki 'tokoh-tokoh sucinya' yang merupakan pendiri dan pelindungnya. Ritus pengorbanan (*rites of sacrifice*), penyucian dan "communion" misalnya merupakan manifestasi dari kehidupan masyarakat yang terorganisasi. Rumah ibadah adalah institusi publik, yang merupakan fokus peribadatan komunitas; pengaruh peribadatan itu menyebar dan meluas kepada keseluruhan adat istiadat dan kebiasaan komunitas. Seorang individu menyertai peribadatan bukan hanya mewakili individunya; tetapi merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa ia lahir dan dibesarkan dalam komunitas yang kesatuan sosial, organisasi dan tradisinya disimbolisasikan dan dirayakan dalam ritus-ritus, ibadah-ibadah dan kepercayaan sebuah agama kolektif.¹⁶

Dalam hal ini, agama menjadi sumber identitas individu dan kelompok. Relasi-relasi antar individu dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang telah tertanam berdasarkan dogma-dogma keagamaan tertentu. Kuatnya jaringan relasi tersebut sebagai sumber dari kapital sosial, yang menurut Putnam didefinisikan: "hubungan sosial antar individu, membentuk jaringan sosial dan norma saling mempercayai (norms of Trust) yang tumbuh dari hubungan tersebut."¹⁷ Kapital sosial dalam pengertian ini dapat difahami sebagai fenomena struktural (hubungan sosial antar teman, ketetanggaaan dan kolega) dan fenomena budaya (norma-norma sosial yang 'memandu' adanya kerjasama). Bagi Putnam, kelompok agama maupun sosial selalu ditandai dengan adanya hubungan saling bertanggungjawab atas kelestarian nilai-nilai dan budayanya, menegakkan aturan tingkah laku dan mendorong norma saling mempercayai.

¹⁵ Gerth and Mills, *From Max Weber; Essays in Sociology*, (New York: Oxford University Press, 1946), 51

¹⁶ Azyumardi Azra, *Agama dalam Keragaman Etnik di Indonesia* (Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1998), xv

¹⁷ Robert D. Putnam, *Bowling a lone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster Rockefeller Center, 2000), 19

Ketiga elemen ini melahirkan norma kepercayaan bersama (*norms of generalised trust*) yang dapat mendorong terciptanya keuntungan sosial dan efisiensi.¹⁸ Dengan norma kepercayaan bersama itulah kelompok keagamaan dapat menjalin hubungan dengan kelompok lainnya.

Putnam membedakan bentuk kapital sosial menjadi *bridging social capital* (kapital sosial yang menjembatani) dan *bonding social capital* (kapital sosial yang terikat). *Pertama, bridging social capital* ditandai oleh hubungan sosial yang bersifat terbuka (inklusif), para anggotanya mempunyai latar belakang yang heterogen. Orientasi kelompok ini lebih ditekankan upaya-upaya bersama dalam mencari jawaban atas permasalahan bersama dan mempunyai cara pandangan keluar '*outward looking*'. *Kedua, bonding social capital*, kapital sosial dalam bentuk ini bersifat eksklusif, keanggotannya biasanya didasarkan atas berbagai kesamaan, seperti kesamaan suku, etnis dan agama, hubungan antar individu bersifat tertutup, lebih mengutamakan solidaritas dan kepentingan kelompok.¹⁹ Dengan mengikuti pembagian ini, kelompok keagamaan merupakan *bonding social capital* di mana setiap individu bertanggungjawab untuk menjaga nilai-nilai yang telah turun temurun diakui dan dijalankan sebagai tata prilaku dan moral kelompok sosial keagamaannya. Lebih dari itu, *bonding social capital* mensyaratkan loyalitas pada kelompoknya sendiri, dan dapat menyebabkan konflik dan pertentangan dengan kelompok lainnya.

Dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antarumat diperlukan dialog. Menurut Mukti Ali dialog antarumat beragama, mempunyai beberapa karakteristik sebagai:

Encounters between persons and groups with different religions or ideologies in order to come to a common understanding on certain issues, to agree and disagree with appreciation and, therefore, to work with them to discover the secret of the meaning life. It (dialogue) is a process in which individuals and groups learn to wipe out fear and distrust of each other and develop new relations based on mutual trust. A dialogue is a dynamic contact between life and life—not only between one rational view against the other— which is directed towards building the world a new together.²⁰

¹⁸ Putnam, *Bowling a lone*, 20

¹⁹ Putnam, *Bowling a lone*, 22

²⁰ Ali Munhanif, "Prof.Dr.A.Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI*, 304

Menurut Mukti Ali, ada lima kemungkinan dalam membangun hubungan antar agama yaitu: *Pertama, syncretism* yang mengibaratkan adanya penyamaan antar agama, Ali menolak ide tersebut karena baginya Tuhan menciptakan agama merupakan respon untuk konstek sosial yang spesifik, untuk itu, perbedaan agama merupakan sesuatu yang alamiah. *Kedua, reconception* yaitu bentuk baru dari dua agama setelah keduanya bertemu. Cara ini juga ditolak oleh Ali berdasarkan anggapan bahwa agama bukanlah hasil kreasi manusia. *Ketiga, synthesis* yaitu dengan mengambil beberapa elemen dari agama yang ada dan membentuk sesuatu yang baru, Ali juga menolak ide tersebut, karena menurutnya setiap agama mempunyai landasan dan tujuan yang berbeda. *Keempat, conviction* yaitu keyakinan eksklusif masing-masing agama bahwa agamanyalah yang paling benar. Ali juga menolak ide tersebut yang menurutnya tidak cocok untuk masyarakat plural seperti Indonesia. Dan terakhir, Ali menyetujui model *agreement in disagreement*, yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia, menurut Ali, model ini mensyaratkan setiap orang siap menerima perbedaan dan menghormati secara jujur keberadaan orang lain, serta memberikan penghormatan atas berbagai perbedaan seperti aspirasi, budaya, aliran keagamaan.²¹

Leanord Swidler (1984) menginventarisir sepuluh prinsip dalam dialog antarumat beragama, yaitu: 1) tujuan utama dialog adalah untuk merubah dan meningkatkan persepsi dan pemahaman terhadap realitas dan kemudian berbuat berdasarkan pemahaman tersebut; 2) dialog antarumat beragama merupakan suatu kebutuhan bersama; 3) setiap peserta dialog merupakan pribadi-pribadi yang jujur dan bersungguh-sungguh; 4) setiap peserta juga mempunyai anggapan bahwa patner dialognya merupakan pribadi-pribadi yang jujur dan bersungguh-sungguh pula; 5) setiap partisipan merupakan pribadi yang autientik, dan sadar akan keagamaan masing-masing; 6) setiap peserta yang akan berdialog hendaknya tidak terlalu mempunyai asumsi yang berlebihan, khususnya dalam isu-isu yang sulit untuk disepakati; 7) dialog hanya dapat dilakukan dalam kesederajatan (equals); 8) dialog hanya dapat dilakukan dalam

²¹ Mukti Ali, "Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama", dalam *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Biro Hukum & Humas Depag, 1975), 62-72

suasana saling mempercayai; 9) peserta yang hendak berdialog, hendaknya secara minimal mampu mengkritisi tradisi keagamaannya sendiri; 10) setiap peserta juga secara minimal mempunyai pemahaman terhadap agama lain.²²

Dalam kasus dialog antara Islam dan Kristen, menurut Hassan Hanafi (1977) keduanya mempunyai dua “karakteristik ideal” (*ideal types*) yang kaya untuk dikomparasikan dan selanjutnya bisa mengantarakan kepada suatu *common platform*. Dialog perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip humanisme, karena antara Islam dan Kristen mempunyai pandangan yang kosmopolit mengenai manusia yang lebih memudahkan untuk melakukan komparasi antara dua dimensi: antropologis dan teologis. Tuhan dan manusia, menurut Hanafi, merupakan kata kunci bagi timbulnya persatuan dan perpecahan antara kultur modernitas dan kultur tradisional atau antara Kristen dan Muslim di Timur.²³ Hal penting yang perlu diperhatikan dalam dialog ini menurut Hans Kung (1998) adalah, bahwa setiap orang beragama harus membuktikan keimanannya masing-masing. Terlepas dari semua perbedaan yang ada. Menurut Kung, orang Kristen dan Islam harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dan melayani masyarakat manusia dengan penuh penghormatan satu sama lain.²⁴

Bambang Pranowo (2004) dengan mengutip Lynch (2000) mengidentifikasi adanya lima kategori seseorang atau kelompok yang berimplikasi pada sikap kulturalnya: *Pertama*, sikap eksklusif, yaitu mengagungkan superioritas sistem kepercayaan sendiri dan menonjolkan hak untuk menyebarkan sistem itu seluas mungkin. *Kedua*, sikap apologetic (membela diri) baik dalam arti mempertahankan doktrin ketika ditantang dari luar maupun dalam arti usaha untuk menunjukkan bahwa doktrin sendiri superior di banding doktrin-doktrin lain. *Ketiga*, sikap sinkretik, yaitu mengakui beragamnya tradisi keagamaan yang tidak hanya dalam masyarakat yang multi-budaya, tetapi juga ada dalam diri pribadi. *Keempat*, sikap inklusif. Sembari menegaskan

²² Leonard Swidler, The Dialogue Decalogue; Ground Rules For Interreligious Dialogue, *Inter-Religio* 5/Spring 1984, 2

²³ Hassan Hanafi, *Religious Dialogue & Revolution, Essay on Judaism, Christianity & Islam* (Cairo: The Anglo Egyptian Bookshop, 1977), 13

²⁴ Hans Kung, “Sebuah Model Dialog Kristen-Islam” dalam Jurnal *Paramadina* (Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998), 32

superioritas sistem kepercayaan sendiri, sikap inklusif menerima validitas atau hak sistem kepercayaan lainnya untuk eksis, meskipun, sistem kepercayaan lain tersebut dianggap kurang sempurna dan kurang benar. *Kelima*, sikap pluralis, yakni mengakui bahwa kebenaran itu beragam dan bersikap positif terhadap kesamaan tujuan dan fungsi semua agama. Pluralisme mengambil posisi bahwa agama sendiri tidak dapat mewakili pemenuhan ataupun penyempurnaan agama-agama lain.²⁵

Menurut Appleby, dialog antarumat beragama diperlukan karena agama sering kali dijadikan dalil untuk “pembenaran tindak kekerasan” (*justification of violence*) Kekerasan keagamaan (*religious violence*) terjadi ketika para pemimpin ekstremis agama tertentu, dalam reaksi mereka terhadap apa yang mereka pandang sebagai ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural suatu masyarakat, berhasil memanfaatkan argumen-argumen keagamaan (atau etnis-keagamaan) untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Penolakan keagamaan terhadap berbagai kekuatan ektremisme (*religious resistance to force of extremism*) dimungkinkan jika para pemimpin agama berhasil menumbuhkan militansi anti-kekerasan (*non-violent militancy*), baik sebagai norma agama maupun sebagai strategi untuk menentang dan mengatasi ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural masyarakat. Upaya-upaya perdamaian oleh agama (*religious peacebuilding*) terjadi ketika para pemeluk agama yang militan dan mau mendedikasikan diri mereka kepada sikap dan aksi-aksi tanpa kekerasan, memiliki kemampuan teknis dan profesional untuk mencegah, memberi sinyal awal, memerantarai dan melakukan unsur-unsur lain ke arah transformasi konflik dan kekerasan.²⁶

Appleby memperkenalkan pendekatan transformasi dalam mengelola konflik antarumat beragama yaitu dengan mengganti media-media kekerasan dengan media-media anti kekerasan atau menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi tanpa kekerasan. Transformasi konflik memiliki tiga dimensi: *conflict management* (manajemen konflik); meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya

²⁵ M. Bambang Pranowo, *Pendidikan Multikultural dan Masa Depan Bangsa*, Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural, pada tanggal 1 September 2004 di Jakarta, 7

²⁶ Appleby, *The Ambivalence of The Sacred*, 282

konflik ke arah lain, *conflict resolution* (resolusi konflik); mencakup tindakan penghilangan dengan semaksimal mungkin terhadap bentuk-bentuk ketidakseimbangan yang terjadi di antara pihak-pihak yang sedang berselisih dengan cara mediasi, negosiasi, atau advokasi serta *testimony* pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dan *structural reform* (reformasi struktural) yaitu usaha-usaha yang diarahkan pada akar penyebab konflik dan untuk membangun praktik-praktik serta institusi-institusi jangka panjang yang kondusif bagi relasi-relasi damai dan anti kekerasan di dalam masyarakat.²⁷

Dialog antarumat beragama biasanya digerakkan oleh aktor-aktor keagamaan. Bauta (2005) mengidentifikasi beberapa peran yang dapat dimainkan oleh aktor-aktor keagamaan: *Pertama*, advokasi, yang dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan dengan konsentrasi pada pemberdayaan yang lemah dalam situasi konflik, pembaharuan hubungan dan transformasi struktur ketidakadilan dalam masyarakat. *Kedua*, mediasi, dengan fokus menjembatani beberapa kelompok secara bersama-sama dalam mencari solusi atas perbedaan dan pencapaian kerukunan. *Ketiga*, pemantauan, aktivitas yang diarahkan untuk meneliti, mengkaji, memahami fenomena, dan investigasi permasalahan kerukunan. *Keempat*, pendidikan, yang bertujuan memberikan kemampuan pada peserta dalam resolusi konflik, pluralisme dan demokrasi serta dapat mempromosikan kerukunan dan perdamaian. *Kelima*, keadilan transisional, aktivitas yang diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan promosi pada HAM.²⁸

Menurut Parekh, untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang beranekaragaman diperlukan pendekatan multikultural. Bagi Parekh, multikultural merupakan fakta keanekaragaman budaya, sedangkan multikulturalisme merupakan respon normatif terhadap keanekaragaman tersebut.²⁹ Parekh mengajukan tiga proposisi dalam memahami multikulturalisme, yaitu: *Pertama*, keterikatan manusia secara budaya; yaitu

²⁷ Appleby., *The Ambivalence of The Sacred*, 212

²⁸ Bauta, O-relana, dan Abu-Neimer (2005) *Faith Based Peace Building: Mapping and Analysis of Christian, Muslim and Multi-Faith Actors*, (Netherlands Institute of International Relation and salaam institute for peace and justice, Washington DC, 7

²⁹ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory*, (UK: Macmillan Press Ltd, 2002), 6

manusia berkembang dan hidup dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural dan menjalankan kehidupan dan relasi-relasi sosialnya dalam kerangka sistem makna yang diturunkan secara kultural. *Kedua*, pluralitas budaya; yaitu di mana perbedaan budaya merepresentasikan perbedaan sistem makna dan visi terhadap kehidupan yang baik, karena tiap-tiap budaya menyadari keterbatasan jangkauan kapasitas dan emosi manusia, dan hanya dapat memahami sebagian dari totalitas eksistensi manusia, maka ia membutuhkan budaya lain untuk dapat memahami dirinya sendiri secara lebih baik, untuk memperluas horizon intelektual dan moralnya, membentangkan imajinasinya, dan menyelamatkan dirinya dari kecenderungan untuk memutlakkan dirinya. *Ketiga*, masing-masing budaya terbentuk secara plural dan multicultural; budaya tumbuh sebagai hasil dari interaksi sadar maupun tak sadar dengan budaya lain, dan mencerminkan percakapan terus menerus di antara tradisi dan aliran pemikiran yang berbeda.³⁰

Perbedaan budaya, menurut Parekh merupakan sesuatu yang positif dan merupakan sumber dari kreatifitas dan modal bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Bagi Parekh setiap generasi mempunyai cara tersendiri dalam menstransmisikan budaya pada generasi selanjutnya dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus.³¹ Salah satu cara penting dalam penyebaran gagasan multikultural adalah dengan melalui pendidikan multikultural.

Tabel 1:
Perbedaan antara *pluralism* dan multiculturalism³²

	<i>Pluralisme</i>	<i>Multiculturalism</i>
Public Sphere	Individual are <i>treated as equals</i> in a common (neutral) public sphere	The public sphere is not culturally <i>neutral</i> . Public sphere is an arena for cultural negotiation. No group should dominate in a way that excludes other cultural forms
Cultural Diversity	Different cultures <i>allowed</i> a separate cultural sphere, but society has no obligation to acknowledge or support alternative cultural forms.	Different cultures are <i>encouraged</i> . Individuals are considered part of collectivities that provide meaning to their lives. Multiculturalism seeks ways to support these collectivities

³⁰ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 336-338

³¹ Runymede Trust, *Profile Books*, 207

³² W Feinberg, the goals of multicultural Education: a Critical Re-evaluation, *Philosophy of Education*, <http://www.ed.uiuc.edu/eps/PES-Yearbook/96docs/feinberg>.

Dominant principals	<ol style="list-style-type: none"> 1. equality of opportunity 2. freedom of association 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Affiliation 2. cultural recognition
Educational Goals	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitigate social inequality to ensure merit is rewarded 2. Individuals have the right to choose and alternatives should be allowed to offer individuals choices 3. Childers have a right to develop their talents and interests and schools should challenge students by providing different experiences 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cultural pride should be <i>encouraged</i>: <ul style="list-style-type: none"> - to overcome the disjuncture between a child's culture and school culture that exclude a child from participating in the larger society - to correct the lingering affects of oppression and the hegemony of the dominant culture 2. Cultural respect should be fostered: <ul style="list-style-type: none"> - to validate cultural forms that are marginalized by the dominant culture - to preserve opportunities for different expressions of identity 3. cultural information should inform children about the range of historical experiences that have affected those who are or have been considered culturally different (advantage/disadvantage, domination/subordination)

3. Majelis-Majelis Agama di Indonesia

Majelis agama merupakan persatuan atau organisasi keagamaan dalam suatu agama. Di Indonesia ada enam majelis agama yang telah lama dikenal, yaitu: *Pertama*, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. MUI bertujuan untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD, dan GBHN yang diridhoi Allah. Organisasi ini berfungsi : 1) memberikan fatwa atau nasehat tentang masalah agama dan masalah-masalah sosial, 2) meningkatkan ukhuwwah (persaudaraan) Islam serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain, 3) mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain, dan 4) bertindak sebagai media komunikasi antara ulama' dengan pemerintah, dan untuk menterjemahkan

kebijakan pemerintah tentang pembangunan, agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum.³³

Kedua, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) didirikan oleh 29 Gereja-Gereja Indonesia. PGI merupakan kelanjutan serta peningkatan dari Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1950. PGI mempunyai tujuan utama yaitu sebagai tempat permusyawaratan dan usaha bersama menuju keesaan Gereja di Indonesia, (*Tata Dasar PGI, pasal 4*). *Ketiga*, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), merupakan lanjutan dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) yang didirikan pada 1924. KWI mempunyai tujuan memadukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan berbagai tugas pastoral bersama untuk kaum beriman Kristiani, untuk meningkatkan kesejahteraan yang diberikan Gereja kepada manusia, terutama lewat bentuk-bentuk dan cara-cara kerasulan yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat, menurut norma hukum agar sedapat mungkin berjalan seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia (*statute KWI, pasal 4*)

Keempat, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang didirikan pada tanggal 23 Pebruari 1959. Pendirian majelis ini tujuan mengantarkan umat Hindu dalam mewujudkan *jadadhita* dan *moksa*. Spirit yang melandasi berdirinya PHDI adalah atas dasar dharma agama dan dharma negara, umat Hindu mewujudkan kehidupan yang serasi dengan berbhakti ke hadapan Ida Sang Hyang Wdhi Wasa dan cinta kepada tanah air, bangsa, negara yang berdasarkan Pancasila.

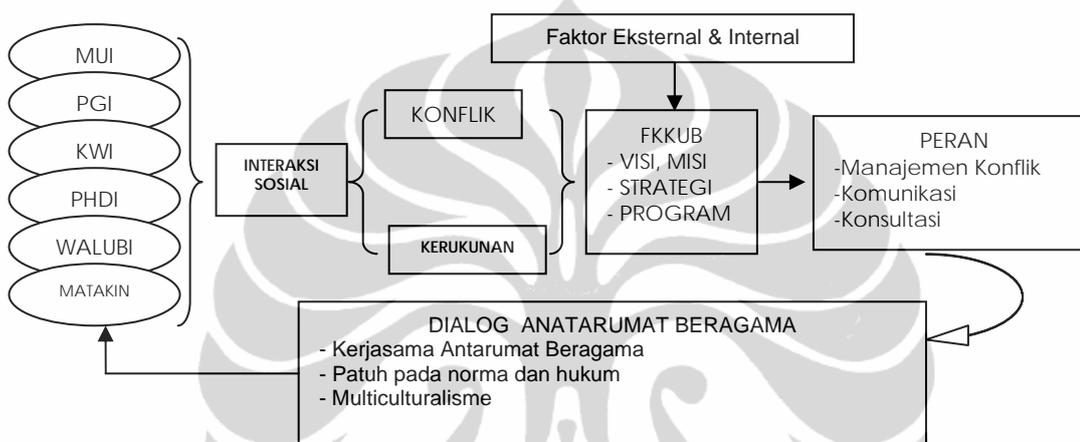
Kelima, Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), didirikan pada tanggal 12 Agustus 1978 di Jakarta. WALUBI bertujuan; a. Mempertahankan dan mengamalkan agama Budha, Pancasila, UUD 45; b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai dimaksud oleh pembukaan UUD; c. Membina dan meningkatkan kehidupan beragama di kalangan umat Budha Indonesia.

4. Model Analisis

Hindu, Budha, Konghucu, Islam, Kristen, dan Katolik merupakan agama yang dipeluk mayoritas masyarakat di Indonesia. Agama-agama tersebut mengorganisasikan diri—secara mayoritas--dalam PHDI, Walubi, Matakini, MUI,

³³ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah Rajawali, 1983), 141

PGI, KWI. Mereka juga melakukan interaksi antara satu dengan lainnya, baik bersifat konflik maupun kerukunan. Salah satu pranata hubungan antarumat beragama adalah FKKUB dengan visi, misi, strategi, program dan kegiatan serta struktur organisasinya telah memainkan peran penting dalam membangun hubungan antarumat beragama. Aktualisasi peran tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam membangun dialog antarumat beragama di Jakarta. Dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara memahami sebuah fenomena sebagai keunikan yang khas dalam situasi tertentu dengan berbagai kompleksitas interaksi yang terjadi di dalamnya. Menurut Neuman (1984), pendekatan kualitatif memfokuskan pada telaah makna-makna subjektif, pengertian-pengertian, metafor-metafor, simbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi,³⁴ dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen penting untuk pengumpulan dan analisa data serta proses secara induktif, diharapkan mampu menghasilkan gambaran tentang fenomena tertentu yang diteliti.

Sedangkan data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat dinamis yang berwujud kata-kata, ekspresi, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-

³⁴ Lawrence W Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Allyn and Bacon, 1984), 318

tokoh agama yang tergabung dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) dan peranan mereka dalam membangun dialog antarumat beragama.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang pada hakekatnya adalah bentuk gambaran yang intensif dengan menganalisis suatu fenomena atau unit sosial seperti individu, kelompok, institusi atau komunitas. Sedangkan kasus yang diteliti adalah aktivitas Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Prov. DKI Jakarta dalam membangun dialog antarumat beragama di Jakarta. Oleh karena itu, sejarah hubungan antarumat beragama dan beberapa kasus konflik antarumat serta berbagai program atau kebijakan dalam membangun dialog antaragama menjadi unit analisis dalam penelitian ini.³⁵

3. Proses Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga strategi yaitu; Wawancara Mendalam (*in-dept interview*), Diskusi Berkelompok dan Studi Dokumen. *Pertama*, dalam melakukan wawancara, peneliti berpedoman pada wawancara semi-struktur dengan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, informan dipilih secara *purposive*, meliputi *key persons* dalam FKKUB, yaitu:

1. Anggota majelis agama: H. Qoimuddin Thamsy (Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta), Pdt. Tandilolo, M Th (Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah DKI Jakarta, Romo Matius Yatno Yuwono (Keuskupan Agung Jakarta), Pedande Rai Sogata (Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta), Pdt. Liem Wira Wijaya (Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) DKI Jakarta), dan Xs. Djengrana Onggawijaya (Majelis Agama Konghucu);
2. Pengurus FKKUB, yaitu: Sekjen FKKUB (H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA) dan Ketua-ketua Pokja (Dr. Sechan Shahab. Rudy Pratikno, SH, Drs. Roy Hatuaon Ritonga, S. Th)

³⁵ Unit analisis itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau artifak social—hasil karya manusia. Karakteristik dari suatu unit analisis dapat diurai berdasarkan kondisi, orientasi dan aksi. Earl R Babbie, *The Practice of Social Research* (California: Wadsworth Publishing, 1979), 87

Kedua, peneliti juga melakukan Diskusi Berkelompok dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh FKKUB. Dalam FKKUB ada pertemuan bulanan, yang dinamakan rapat pleno yaitu pertemuan antara perwakilan majelis-majelis agama; H. Qoimuddin Thamsy, Pdt. Tandilolo, M. Th, Romo Matius Yatno Yuwono, Pedande Rai Sogata, Pdt. Liem Wira Wijaya, dan Xs. Djengrana Onggawijaya dan Musyawarah Tahunan yang dihadiri oleh seluruh anggota FKKUB. Strategi ini diharapkan dapat memahami beberapa isu umum tentang kegiatan dan program FKKUB.

Ketiga, studi dokumen juga dilakukan baik itu pada dokumen yang tercatat seperti dokumen resmi FKKUB, dokumen pribadi, maupun tulisan-tulisan (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) yang dibuat oleh subjek penelitian, dan juga dokumen tervisualisasi seperti foto-foto, berita acara kegiatan, berbagai sertifikat dan plakat. Semua dokumen tersebut, diharapkan mampu menjelaskan fenomena yang tidak dapat ditangkap dalam wawancara.

4. Proses Analisis Data

Dengan didapatkannya data-data penelitian, maka dilakukan analisa data mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama-tama adalah merumuskan konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi ini. Kemudian, data-data yang didapat disortir dan direduksi sehingga didapatkan kategorisasi-kategorisasi yang dibutuhkan dalam studi ini.

Setelah melakukan kategorisasi, kemudian menginterpretasikan data meliputi: deskripsi problem hubungan antarumat beragama di Jakarta, dan penilaian FKKUB tentang problem tersebut. Setelah itu pandangan dan tindakan FKKUB yang tercermin dari berbagai program dan strategi dalam menghadapi problem tersebut. Kemudian deskripsi tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka dialog antarumat beragama sebagai tujuan dari studi ini. Selain itu juga dianalisis faktor-faktor memberikan dukungan dan penolakan terhadap aktivitas FKKUB.